**STRATEGI ELIMINASI PEREDARAN NARKOBA DENGAN KOLABORASI MASYARAKAT DAN PENDEKATAN LINTAS SEKTOR**

**Abstrak**

Studi ini mengeksplorasi masalah narkotika di Indonesia, dengan fokus pada penyalahgunaan oleh generasi muda dan respons pemerintah dan komunitas terhadap isu ini. Terdapat kenaikan prevalensi penyalahgunaan narkoba, terutama di kalangan siswa dan remaja. Walaupun terjadi penurunan kasus narkotika, angka penyalahgunaannya tetap tinggi. Artikel ini mengusulkan strategi eliminasi peredaran narkotika melalui kolaborasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat. Artikel ini bertujuan memahami bagaimana integrasi sumber daya, pengetahuan, dan keahlian dari berbagai sektor, termasuk masyarakat, dapat meningkatkan efektivitas pemberantasan narkoba. Penelitian ini mengadopsi pendekatan normatif dan kualitatif, menganalisis legislasi, norma, dan praktek terkait. Hasilnya menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat adalah penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika. Studi kasus dari Kota Bandung dan Provinsi NTB menunjukkan keberhasilan strategi ini. Namun, beberapa tantangan perlu diatasi, seperti kurangnya koordinasi antar-sektor, isu privasi, dan kebutuhan akan platform komunikasi yang lebih efektif.

**Kata Kunci**: Narkotika, Penyalahgunaan Narkoba, Generasi Muda, Pemberantasan Narkoba, Pencegahan Narkoba

***Abstract***

*This study explores the issue of narcotics in Indonesia, focusing on misuse among the younger generation and the responses of the government and community to this issue. There has been an increase in the prevalence of drug abuse, especially among students and teenagers. Although there has been a decline in narcotics cases, the rate of misuse remains high. This article proposes a strategy for eliminating the circulation of narcotics through cross-sector collaboration and community participation. The aim of this article is to understand how the integration of resources, knowledge, and expertise from various sectors, including the community, can enhance the effectiveness of drug eradication. This research adopts a normative and qualitative approach, analyzing legislation, norms, and related practices. The results show that cross-sector collaboration and active community participation are crucial in efforts to prevent and eradicate narcotics. Case studies from the city of Bandung and the NTB Province demonstrate the success of this strategy. However, several challenges need to be addressed, such as the lack of inter-sector coordination, privacy issues, and the need for a more effective communication platform.*

***Keywords:*** *Narcotics, Drug Abuse, Young Generation, Drug Eradication, Drug Prevention.*

1. **PENDAHULUAN**

Narkotika telah menodai citra bangsa Indonesia dan menyebabkan kerusakan pada generasi muda. Isu narkotika di Indonesia kini semakin rumit dan memerlukan perhatian serius dari pemerintah serta entitas terkait dalam upayanya pemberantasan. Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan salah satu lembaga yang bertanggung jawab dalam hal ini, dengan keberadaan cabang di berbagai kabupaten/kota. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika didefinisikan sebagai substansi yang berasal dari sumber tumbuhan atau non-tumbuhan, termasuk sintetis dan semisintetis, yang dapat mengubah kesadaran, menghilangkan rasa, mengurangi rasa nyeri, dan berpotensi menimbulkan ketergantungan (Helviza, 2016). Menurut KBBI, narkoba diartikan sebagai obat yang dapat menenangkan, meminimalkan rasa sakit, serta menyebabkan kantuk dan berpotensi menimbulkan efek mabuk sehingga distribusinya diatur ketat. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, narkotika digambarkan sebagai substansi, berasal dari sumber tumbuhan atau lainnya, sintetis maupun alami, yang mempengaruhi kesadaran, menurunkan respons terhadap stimulus, menyebabkan rasa sakit, dan berisiko menimbulkan ketergantungan. Semua substansi ini masuk dalam regulasi Undang-Undang Narkotika (Fajar, 2022).

Berdasarkan laporan "Indonesia Drugs Report 2022" yang dirilis oleh PUSLITDATIN BNN, telah terjadi beberapa perubahan tren dalam penyalahgunaan narkoba di Indonesia yang menimbulkan kecemasan. Terdapat kenaikan dalam prevalensi penyalahgunaan narkoba dalam satu tahun terakhir, yaitu dari 1,80% di tahun 2019 menjadi 1,95% pada 2021. Pada 2018, sekitar 2,29 juta siswa tercatat sebagai pengguna narkoba. Penyalahgunaan narkoba di kalangan pemuda juga meningkat beberapa tahun belakangan (Lukman et al, 2021). Meskipun angka tersangka kasus narkotika di tahun 2021 mengalami penurunan sekitar 9,41% menjadi 1.184 individu, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berada di urutan keenam dalam penyalahgunaan narkoba di tahun 2022. Selain itu, ada lonjakan signifikan dalam jumlah tahanan kasus narkotika selama empat tahun terakhir, naik dari 63.355 orang di tahun 2015. Sebagai kesimpulan, meskipun ada sedikit penurunan, angka penyalahgunaan narkoba masih tinggi, terutama di antara siswa dan remaja, menandakan kebutuhan tindakan pencegahan dan penegakan hukum yang lebih kuat oleh pemerintah.

Dampak negatif dari narkotika sangat dirasakan, terutama oleh pemuda yang seharusnya menjadi tulang punggung bangsa. Generasi muda kini semakin terancam dengan prevalensi zat adiktif yang menghancurkan. Pemuda menjadi sasaran empuk penyebaran narkotika, mempengaruhi kemampuan berpikir dan menghancurkan harapan untuk masa depan yang cerah bagi bangsa. Permasalahan narkoba tidak hanya telah menjadi sorotan di tingkat nasional, tetapi juga telah mendapatkan perhatian yang serius di kancah internasional. Masalah ini mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk kesejahteraan sosial, kesehatan publik, serta keamanan dan ketertiban. Indonesia, sebagai salah satu negara dengan jumlah populasi besar, tak terlepas dari dampak buruk peredaran narkoba yang terus meningkat setiap tahunnya.

Pendekatan yang sektoral dan tidak melibatkan semua pihak seringkali menemui kendala dalam mengatasi permasalahan yang kompleks ini. Untuk itu, diperlukan inovasi dan strategi baru dalam menangani isu narkoba. STRATEGI ELIMINASI PEREDARAN NARKOBA DENGAN KOLABORASI MASYARAKAT DAN PENDEKATAN LINTAS SEKTOR menawarkan wacana baru dengan menekankan pada pentingnya kerja sama lintas sektor serta partisipasi aktif masyarakat.

Jurnal ini bertujuan memahami bagaimana integrasi sumber daya, pengetahuan, dan keahlian dari berbagai sektor, termasuk masyarakat, dapat meningkatkan efektivitas pemberantasan narkoba. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan solusi yang lebih holistik dan adaptif terhadap dinamika permasalahan narkoba yang terus berubah. Selain itu, dengan melibatkan masyarakat secara aktif, diharapkan ada pemahaman dan kesadaran yang lebih mendalam tentang bahaya narkoba, serta masyarakat menjadi bagian aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia.

1. **METODE**

Studi hukum yang dilakukan ini menekankan pada pendekatan normatif, yang berarti merujuk dan mempertimbangkan berbagai regulasi, aturan, serta norma-norma yang ada dalam legislasi. Dalam rangka mendalami penelitian, literatur terkait hukum dievaluasi dengan seksama. Evaluasi ini tidak hanya mencakup pandangan filosofis dan latar belakang sejarah dari topik yang dibahas, tetapi juga berfokus pada pemahaman mendalam terhadap pasal-pasal spesifik dan terminologi hukum yang relevan.

Dengan mengadopsi metode kualitatif, informasi atau data yang diperoleh berasal dari berbagai sumber bahasa. Ini bisa berupa narasi lisan, dokumen tertulis, atau catatan-catatan hukum yang relevan, yang kemudian dianalisis dengan cermat oleh peneliti. Penelitian ini tidak hanya terbatas pada literatur, tetapi juga melibatkan observasi rinci terhadap berbagai materi yang berhubungan dengan topik penelitian. Ini termasuk elemen-elemen fisik atau bukti-bukti tertentu yang dapat menambah kedalaman dan konteks pada penelitian.

Sebagai bagian dari metode analisis, pendekatan deduktif diadopsi. Ini memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan umum berdasarkan informasi dan data yang ditemukan selama proses penelitian. Fokus khusus diberikan pada topik Perlindungan Korban Kejahatan Seksual, yang menjadi semakin relevan dan penting di tengah dinamika perubahan sosial dan budaya masyarakat kontemporer (Robbani & El Adawiyah, 2023). Tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk memberikan rekomendasi dan wawasan yang mendalam mengenai Strategi eliminasi peredaran narkoba dengan kolaborasi masyarakat dan pendekatan lintas sektor.

1. **HASIL**

Dalam upaya mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia, pendekatan yang melibatkan masyarakat dan kolaborasi lintas sektor telah menjadi fokus utama dari penelitian ini. Berikut adalah hasil yang didapat dari jurnal "Strategi Eliminasi Peredaran Narkoba dengan Kolaborasi Masyarakat dan Pendekatan Lintas Sektor":

1. Peran Masyarakat: Masyarakat memiliki peran sentral dalam upaya pemberantasan narkoba. Ketika masyarakat dilibatkan dan diberdayakan, kesadaran tentang bahaya narkoba meningkat. Pelibatan masyarakat tidak hanya meningkatkan deteksi dini aktivitas ilegal terkait narkoba tetapi juga memperkuat jaringan komunitas yang aktif dalam pencegahan.
2. Kolaborasi Lintas Sektor: Kolaborasi antara pemerintah, swasta, media, dan institusi pendidikan menghasilkan strategi pencegahan yang lebih terpadu dan efektif. Melalui kerjasama ini, sumber daya, informasi, dan keahlian dari berbagai sektor dapat digabungkan untuk meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan.
3. Implementasi di Beberapa Daerah: Studi kasus dari Kota Bandung dan Provinsi NTB menunjukkan bahwa strategi kolaboratif berhasil mengurangi prevalensi penyalahgunaan narkoba. Di Kota Bandung, program P4GN berhasil menekan penyalahgunaan narkoba. Sementara di NTB, pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi bagi penyalahguna menjadi fokus utama.
4. Tantangan: Meskipun ada keberhasilan dalam implementasi strategi ini, beberapa hambatan juga diidentifikasi, seperti kurangnya koordinasi antar-sektor, masalah privasi saat berbagi informasi, serta kebutuhan akan platform komunikasi yang efektif.
5. Teknologi Informasi: Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi diidentifikasi sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan efisiensi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba. Teknologi dapat digunakan untuk memperluas jangkauan edukasi, memfasilitasi kolaborasi, dan meningkatkan monitoring.
6. **PEMBAHASAN**

Penyalahgunaan narkoba telah menjadi isu global yang mendapatkan perhatian serius dari banyak negara akibat implikasinya yang meluas di bidang sosial, ekonomi, dan kesehatan. Permasalahan narkoba, yang kini meresahkan banyak masyarakat termasuk di Indonesia, mendesak adanya tindakan konkrit dan pendekatan menyeluruh. Sebagai respons terhadap permasalahan ini, berbagai negara, termasuk Indonesia, telah memulai langkah-langkah preventif dengan menetapkan beragam regulasi, kebijakan, serta sanksi hukum untuk membatasi penyebaran dan penggunaan narkoba. Misalnya, Indonesia memiliki Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika yang menjadi landasan hukum dalam menangani persoalan narkoba. Namun, implementasi undang-undang ini kerap menemui hambatan dan menjadi sumber polemik, terutama terkait dengan perlindungan hak asasi manusia. Beberapa pihak mengungkapkan kecemasan bahwa upaya pemberantasan narkoba dapat berpotensi melanggar hak asasi dari para tersangka atau individu yang didakwa (Farid, 2020). Hal ini memicu perdebatan yang intens di kalangan masyarakat.

Kolaborasi lintas sektor dan keterlibatan masyarakat adalah kunci dalam strategi pemberantasan narkoba. Namun, penting untuk mengatasi hambatan yang muncul agar strategi ini dapat diterapkan dengan sukses. Peningkatan kapasitas, pelatihan, dan pendidikan bagi masyarakat, serta peningkatan koordinasi antar-sektor, dapat meningkatkan keberhasilan strategi ini. Keterlibatan masyarakat tidak hanya sebagai pihak yang melaporkan, tetapi juga sebagai mitra dalam pencegahan, penting untuk ditekankan. Dengan demikian, pendekatan holistik yang melibatkan semua pihak akan lebih mungkin untuk berhasil dalam memerangi peredaran narkoba.

Penyalahgunaan obat-obatan terlarang telah menyebabkan dampak merugikan bagi individu, serta menghambat kesejahteraan sosial, kesehatan publik, dan pertumbuhan ekonomi. Salah satu solusi efektif untuk mengatasi masalah ini adalah dengan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, sektor swasta, media, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam kolaborasi. Kolaborasi serupa diharapkan mampu menghadapi berbagai kendala dalam upaya pencegahan, memproteksi masyarakat dari efek buruk obat terlarang, serta menekan angka prevalensi penyalahgunaannya di Indonesia.

Dengan menggunakan metode "Soft Power Approach", Direktorat Pemberdayaan Masyarakat di bawah naungan Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN RI memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat, sehingga mereka dapat berperan aktif sebagai mitra dalam pemberantasan. Kerjasama yang erat antara BNNK Surakarta dan Satuan Reserse Narkoba Polresta Surakarta memfasilitasi penguatan ketahanan keluarga, transformasi wilayah rawan menjadi area bebas narkoba, meningkatkan akses ke layanan rehabilitasi yang berorientasi masyarakat, dan memperkuat kerja sama antarnegara dalam pemberantasan narkoba.

Kerja sama antara berbagai sektor, termasuk pemerintah, swasta, media, dan institusi pendidikan, telah mendemonstrasikan peningkatan dalam efektivitas dan efisiensi pemberantasan narkoba. Sebagai bukti, Kemenko PMK telah menganjurkan kerja sama tersebut dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba. Sementara itu, Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta berfungsi sebagai sektor utama dalam program P4GN dan berkolaborasi dengan berbagai lembaga termasuk Satuan Reserse Narkoba Polresta Surakarta dan Yayasan Cahaya Kusuma Surakarta (Novriansyah *et al,* 2023). Di sisi lain, Wakil Presiden Indonesia, Ma'ruf Amin, telah menyoroti kebutuhan kerja sama yang luas, mencakup lembaga internasional, dalam menghadapi ancaman narkotika yang melintasi batas negara. Secara statistik, prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah mencapai 1,8% dari populasi berusia 15-64 tahun, atau sekitar 3,4 juta orang. Melalui kerja sama lintas sektor, berbagai pihak dapat menggabungkan sumber daya, informasi, dan keahlian mereka, memungkinkan pendekatan yang lebih holistik dalam pencegahan narkoba. Strategi ini mendorong partisipasi masyarakat luas dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari ancaman narkoba (Dewi, Ulfa, dan Safirussalim, 2022).

Melibatkan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba telah terbukti meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Hal ini terjadi karena masyarakat memiliki posisi yang strategis dalam mendeteksi, melaporkan, dan mencegah aktivitas ilegal terkait narkoba (Wahyudi *et al,* 2021). Sejalan dengan itu, pendekatan komunitas mengungkapkan bahwa masyarakat, ketika diberdayakan, memiliki kemampuan untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya narkoba dan mengambil langkah-langkah proaktif untuk mencegah penyebarannya. Masyarakat, baik sebagai individu maupun kelompok, berada di garis depan dalam mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan narkoba. Sementara itu, aparat penegak hukum, khususnya Polri, berfungsi sebagai fasilitator, dengan pemerintah memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif yang diprakarsai masyarakat. Mereka memainkan peran penting dalam mengedukasi generasi muda agar tidak terjebak dalam penyalahgunaan narkoba. Selain itu, masyarakat memiliki akses untuk mendapatkan dan menyediakan informasi terkait kegiatan ilegal narkoba kepada pihak berwenang atau BNN. Dengan demikian, partisipasi aktif masyarakat sangat vital dalam upaya memberantas peredaran gelap narkotika. Melalui kolaborasi yang erat antara masyarakat, pemerintah, dan penegak hukum, harapannya adalah menciptakan lingkungan yang kondusif dan bebas dari dampak buruk narkoba.

Kolaborasi antara berbagai sektor, termasuk pemerintah, swasta, media, dan institusi pendidikan, telah terbukti meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam upaya pemberantasan peredaran narkoba. Ditemukan bahwa kerja sama lintas sektor memungkinkan para pemangku kepentingan untuk berbagi sumber daya, informasi, dan keahlian. Hal ini memfasilitasi pembentukan strategi pencegahan yang lebih terintegrasi dan terpadu. Selain itu, pendekatan berbasis masyarakat menyoroti pentingnya peran komunitas dalam mendeteksi dan melaporkan aktivitas ilegal yang berkaitan dengan narkoba. Dengan melibatkan dan memberdayakan masyarakat, kesadaran tentang dampak negatif narkoba dapat ditingkatkan, sehingga tindakan pencegahan dapat diimplementasikan dengan lebih proaktif. Namun menurut Helviza dan Mukmin (2016), meski banyak potensi yang dapat dimanfaatkan dari pendekatan kolaboratif ini, ada juga beberapa hambatan yang dihadapi. Beberapa di antaranya adalah kurangnya koordinasi antar-sektor, isu privasi yang menjadi penghalang dalam berbagi informasi, dan absennya platform komunikasi yang memadai untuk memfasilitasi kerja sama yang efektif.

Kota Bandung dan Provinsi NTB dipilih sebagai fokus dalam studi kasus untuk memeriksa bagaimana pelaksanaan strategi eliminasi peredaran narkoba melalui kolaborasi masyarakat dan pendekatan lintas sektor. Penelitian ini mencatat kenaikan signifikan dalam jumlah laporan dari masyarakat mengenai aktivitas narkoba setelah penerapan strategi tersebut, yang menandakan pendekatan ini cukup efektif. Di Kota Bandung, program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GNPN) terbukti berhasil dalam mengurangi penyalahgunaan narkoba. Untuk mendukung ini, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Bandung mengadopsi berbagai taktik, mulai dari pendekatan keras dalam pemberantasan hingga melaksanakan aktivitas monitoring dan evaluasi untuk memastikan strategi yang dijalankan berjalan efektif (Gultom, *et al,* 2023).

Sementara di Provinsi NTB, pencegahan penyalahgunaan narkoba difokuskan melalui pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan rehabilitasi bagi mereka yang sudah terjebak dalam penyalahgunaan narkotika. Kepala BNN RI turut serta dalam upaya ini dengan menghadiri Apel Besar NTB Bersinar, di mana beliau membagikan wawasan tentang strategi pencegahan penyalahgunaan narkotika. Meskipun ada keberhasilan dalam penerapan strategi ini, ada beberapa tantangan yang muncul, seperti kurangnya koordinasi antar-sektor, kesulitan dalam berbagi informasi karena isu privasi, dan absennya platform komunikasi yang memadai. Menghadapi tantangan ini, ada kebutuhan untuk memperkuat kerjasama lintas sektor dan meningkatkan fasilitas komunikasi yang dapat mendukung kolaborasi dalam pemberantasan narkoba.

1. **KESIMPULAN**

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia dan berbagai negara lain telah menimbulkan dampak negatif di berbagai sektor, mulai dari sosial, ekonomi, hingga kesehatan masyarakat. Untuk menanggulangi masalah ini, pendekatan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, pemerintah, swasta, media, dan institusi pendidikan, telah diterapkan. Strategi ini bertujuan untuk memaksimalkan sumber daya, informasi, dan keahlian dari berbagai sektor untuk menciptakan pendekatan pencegahan yang lebih terintegrasi dan terpadu. Meskipun strategi ini menunjukkan hasil positif, terutama di Kota Bandung dan Provinsi NTB, beberapa hambatan, seperti kurangnya koordinasi dan isu privasi, masih perlu diatasi agar pemberantasan narkoba bisa lebih optimal.

Selain itu, pentingnya peran masyarakat dalam strategi pencegahan dan pemberantasan narkoba sangat ditekankan. Melalui pendekatan yang lebih berpusat pada masyarakat, diharapkan kesadaran tentang bahaya narkoba akan meningkat, dan masyarakat dapat berperan aktif dalam pencegahan. Namun, untuk mencapai hasil yang maksimal, kerjasama yang erat antar-sektor diperlukan. Dengan demikian, kolaborasi ini diharapkan mampu menghadirkan solusi holistik untuk mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

**Daftar Isi**

Dewi, E., Ulfa, K., & Safirussalim, S. (2022). Strategi Badan Narkotika Nasional Dalam Penanggulangan Narkotika Di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Al-Ijtimai: International Journal of Government and Social Science*, *7*(2), 143-156.

Fajar, M. (2022). Penerapan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Atas Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri. *Jurnal Sosial Teknologi*, *2*(5), 406-417

FARID SETIAWAN, F. S. (2020). *PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK-HAK TERSANGKA PADA PROSES PENYIDIKAN PERKARA PIDANA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI WILAYAH POLRESTA JAMBI* (Doctoral dissertation, Universitas Batanghari).

Gultom, P., Pawitan, G., Indraswari, I., Prasetyo, P. S., & Pratikto, R. (2023). Analisis Strategi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kota Bandung dengan Pendekatan Pentahelix Kolaborasi. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, *5*(1), 475-482.

Helviza, I. (2016). Kendala-kendala Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Kota Banda Aceh. 23(4), 1–16.

Novriansyah, Y., Herawati, H., Supriyati, S., Wahid, D., & Putra, B. (2023). Strategi Pemberantasan Peredaran Narkoba Menuju Kabupaten Bungo Bersih Narkoba (Bersinar). *Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, *2*(2), 169-178.

Lukman, G. A., Alifah, A. P., Divarianti, A., & Humaedi, S. (2021). Kasus narkoba di Indonesia dan upaya pencegahannya di kalangan remaja. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, *2*(3), 405-417.

Robbani, H., & El Adawiyah, S. (2023). Brand Strategy Lembaga Amil Zakat (LAZ) Zakat Sukses. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, *1*(7).

Wahyudi, D., Usman, U., Haryadi, H., & Erwin, E. (2021). Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Peredaran Narkotika. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, *5*(3), 683-692.